PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : 43 TAHUN 2007

T E N T A N G

RENCANA OPERASI
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU
TAHUN 2007 (1428 H)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat pada Angkutan Lebaran Tahun 2007 (1428 H), yang tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat, perlu dilakukan perencanaan, pemantauan dan pengendalian secara terpadu;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2007 (1428 H).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2007;

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 2006;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 283 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2007 (1428H).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA OPERASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2007 (1428 H).

Pasal 1

Dalam rangka pelayanan Angkutan Lebaran Tahun 2007 perlu diatur Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2007 (1428 H) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2007 (1428 H) mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pada moda angkutan jalan meliputi wilayah Provinsi Lampung, Pulau Jawa dan Bali, angkutan kereta api meliputi 9 Daops di Pulau Jawa dan 3 Divre di Pulau Sumatera, angkutan penyeberangan meliputi 7 lintasan penyeberangan utama, moda laut meliputi 52 Pelabuhan dan moda udara meliputi 23 Bandar Udara secara tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2007 (1428 H) dilaksanakan melalui persiapan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi oleh masing–masing instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tetap mengutamakan koordinasi antar instansi guna keterpaduan dalam pelaksanaannya.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 20 AGUSTUS 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pekerjaan Umum;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Menteri Pertanian;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14. Menteri Komunikasi dan Informatika;
15. Panglima TNI;
16. Kepala Kepolisian RI;
17. Para Gubernur seluruh Indonesia;
18. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
19. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan Litbang, Kepala BASARNAS di lingkungan Departemen Perhubungan;
20. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika;
21. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi seluruh Indonesia;
22. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kota/Kabupaten seluruh Indonesia.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

ttd

HERU PRASETYO, SH.
NIP. 120 138 360

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor : KM 43 TAHUN 2007
Tanggal : 20 AGUSTUS 2007

RENCANA OPERASI
PENYELENGGARAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU
TAHUN 2007 (1428 H)

I. TUGAS POKOK

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu sebagaimana telah dibentuk dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 283 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2007 (1428 H), merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu agar dapat berjalan dengan tertib, cepat, aman, nyaman dan selamat sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan ini.

II. WILAYAH DAN WAKTU PENYELENGGARAAN

A. Wilayah Penyelenggaraan.

1. Transportasi Darat.

   Mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pengendalian terpadu pada:

   a). Angkutan Jalan

   8 (delapan) Provinsi yaitu : Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

   b). Angkutan Kereta Api

   9 (sembilan) Daerah Operasi yaitu : Daop I DKI Jakarta, Daop II Bandung, Daop III Cirebon, Daop IV Semarang, Daop V Purwokerto, Daop VI Yogyakarta, Daop VII Madiun, Daop VIII Surabaya dan Daop IX Jember dan 3 (tiga) Divisi Regional (Divre) yaitu Divre I Sumatera Utara, Divre II Sumatera Barat dan Divre 3 Sumatera Selatan.

   c). Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

   7 (tujuh) lintasan penyeberangan utama yaitu : Merak – Bakauheni (Jawa-Sumatera), Ujung – Kamal (Jawa-Madura), Ketapang – Gilimanuk (Jawa-Bali), Padangbai - Lembar (Bali-Lombok), Palembang – Muntok (Sumatera – Bangka), Bajoe – Kolaka (Sulsel – Sultra) dan Kayangan – Pototano (NTB).

2. Transportasi Laut.

   Mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pengendalian terpadu meliputi 52 (lima puluh dua) pelabuhan laut yaitu Belawan, Sibolga, Tg. Balai Asahan, Dumai, Pekanbaru, Sei Pakning, Kendari, Selat Panjang, Batam, Tg. Batu, Tg. Uban, Tg. Pinang, Sei Kolak Kijang, Tg. Pandan, Pkl. Balam/Blinyu, Jambi/Kuala Tungkal, Palembang, Teluk Bayur, Tg. Priok, Benoa, Tg. Mas, Gresik, Tg. Perak, Pontianak, Kumai, Sampit, Banjarmasin, Tg. Balai Karimun, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Nunukan, Makasar, Pare – Pare, Pantoloan, Bitung, Gorontalo, Tual, Bau – Bau, Siwa, Lembar, Kupang, Ternate, Ambon, Jayapura, Biak, Sorong, Merauke, Manado, Namlea, Sanana, Manokwari.

3. Transportasi Udara.

   Mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pengendalian terpadu meliputi 23 (dua puluh tiga) Bandara yaitu Soekarno Hatta (Jakarta), Juanda (Surabaya), Hasannudin (Makasar), Polonia (Medan), Ngurah Rai (Denpasar), Samsuddin Noer (Banjarmasin), Sepinggan (Balikpapan), Ahmad Yani (Semarang), Juwata (Tarakan), El Tari (Kupang), Adi Soetjipto (Yogyakarta), Sultan Syarief Kasim II (Pekanbaru), Supadio (Pontianak), Hang Nadim (Batam), Minangkabau (Padang), Depati Amir (Pangkal Pinang), Adi Soemarmo (Solo), Sam Ratulangi (Manado), Selaparang (Mataram), Sultan Thaha (Jambi), Sultan Baabullah (Maluku Utara), Mutiara (Palu), Sultan Badaruddin II (Palembang).

4. Kegiatan Penunjang.

   a). Pelayanan Pos dan Telekomunikasi
   Pelayanan pos dan telekomunikasi mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan mengkoordinasikan kegiatan Pos dan Telekomunikasi dalam rangka kesiapsiagaan dan mengendalikan unsur-unsur Pos dan Telekomunikasi di seluruh wilayah tanggung jawab Pos dan Telekomunikasi.

   b). Pelayanan SAR.
   Pelayanan SAR mencakup seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia baik darat, laut maupun udara dengan mengkoordinasikan kegiatan SARNAS dalam rangka kesiapsiagaan dan mengendalikan unsur-unsur SAR di seluruh wilayah tanggung jawab Badan SAR Nasional, dalam rangka mengantisipasi terjadinya musibah/kecelakaan pelayaran, penerbangan, bencana dan musibah lainnya.

   c). Pelayanan Meteorologi dan Geofisika.
   Pelayanan Meteorologi dan Geofisika mencakup seluruh Wilayah Indonesia yang dipusatkan pada Kantor-kantor Balai Meteorologi dan Geofisika, yaitu: Wilayah I di Medan, Wilayah II di Jakarta, Wilayah III di Denpasar, Wilayah IV di Makassar, Wilayah V di Jayapura dan Kantor Badan Meteorologi dan Geofisika Pusat Jakarta.

B. Waktu Penyelenggaraan.

Waktu pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2007 (1428 H) dilaksanakan pada :

1. Hari **Sabtu, 6 Oktober 2007 (H–7) pukul 00.00** waktu setempat s/d hari **Minggu, 21 Oktober 2007 (H+7) pukul 24.00** waktu setempat, untuk :

   a). Angkutan Jalan
   b). Angkutan Kereta Api
   c). Angkutan Penyeberangan
   d). Angkutan Udara

2. Hari **Jumat, 28 September 2007 (H-15) pukul 00.00** waktu setempat s/d hari **Senin, 29 Oktober 2007 (H+15) pukul 24.00** waktu setempat, untuk Angkutan Laut.

3. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung meliputi pelayanan Postel, SAR dan Meteorologi dan Geofisika disesuaikan dengan kebutuhan.

Untuk melakukan pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran, dan sebagai sarana komunikasi dan informasi, dibentuk Pos Koordinasi (POSKO) Angkutan Lebaran Terpadu baik di Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota. POSKO dilaksanakan secara berjenjang **mulai hari Sabtu, 6 Oktober 2007 (H-7) pukul 00.00 waktu setempat s/d hari Senin, 22 Oktober 2007 (H+8) pukul 08.00 waktu setempat**.

III. A S U M S I

Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2007 (1428 H) ini disusun berdasarkan asumsi bahwa selama masa Angkutan Lebaran:

a. Tidak terjadi gejolak sosial dan/atau kerusuhan sosial yang berskala Nasional;
b. Tidak terjadi bencana alam di luar kemampuan;
c. Tidak terjadi pemogokan operator sarana angkutan umum;
d. Tidak terjadi kemacetan lalu lintas di luar perkiraan;
e. Tidak terjadi ancaman/musibah akibat tindakan terorisme.

Untuk memudahkan pengaturan dan pendataan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran dilakukan dalam dua tahap yaitu pada saat arus mudik dan arus balik.

Yang dimaksud ***Arus Mudik*** adalah seluruh perjalanan mulai H-7 s/d H2 (jumlah perjalanan hingga H2), sedangkan ***Arus Balik*** merupakan perjalanan mulai H+1 s/d H+7 (jumlah perjalanan mulai H+1 hingga selesai masa lebaran).

IV. KEADAAN DAN MASALAH

A. Keadaan

1. Lebaran merupakan salah satu kegiatan sosial budaya bangsa Indonesia yang ditandai dengan mengunjungi orang tua, saudara, kerabat atau handai taulan yang dilakukan setahun sekali. Perjalanan ini sebagian besar dilakukan ke kampung halaman yang waktunya secara bersamaaan sehingga mengakibatkan permintaan jasa angkutan meningkat dengan tajam, baik moda angkutan darat, laut maupun udara. Disamping meningkatnya lalu lintas orang, lalu lintas barang dan kebutuhan pokok untuk keperluan lebaran juga meningkat dengan drastis seiring dengan kebutuhan masyarakat pada hari lebaran.

2. Adanya kebijaksanaan Pemerintah dalam pengaturan Hari Libur dan Cuti bersama Idul Fitri (mulai tanggal 12 – 16 Oktober 2007) akan menambah hasrat untuk melakukan perjalanan ke daerah baik untuk tujuan mudik, berlibur atau tujuan lain sehingga membawa konsekuensi pada peningkatan gangguan keamanan, perubahan pola arus mudik yang harus dicermati guna mengurangi terjadinya kemacetan di ruas jalan tertentu dan penumpukan penumpang serta kendaraan di berbagai terminal, dermaga penyeberangan, stasiun kereta api, pelabuhan atau bandar udara tertentu.

3. Kecenderungan maskapai penerbangan akan menerapkan tarif batas atas karena demand tinggi, sehingga diprediksikan akan mendorong sebagian pengguna pesawat udara untuk jarak sedang akan berpindah/beralih ke moda Jalan, sebagai contoh untuk rute-rute penerbangan Jakarta-Palembang, Jakarta-Pekanbaru, Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Semarang, dsb.

4. Dengan memperhatikan kecenderungan angkutan lebaran selama 7 (tujuh) tahun terakhir mengalami peningkatan, maka diperkirakan jumlah pemudik dan kendaraan yang melakukan perjalanan mudik lebaran tahun 2007 (1428 H) akan cenderung meningkat dibanding dengan angkutan lebaran tahun yang lalu **khususnya penggunaan sepeda motor** sebagai sarana untuk melakukan perjalanan.

5. Masih terjadi luapan lumpur panas PT. Lapindo Brantas Inc. di Porong (Kabupaten Sidoarjo) akan mengganggu lalu lintas di wilayah Surabaya dan sekitarnya serta perjalanan dari/ke Bali, khususnya yang melalui jalan arteri utama Sidoarjo-Porong-Gempol, jalan tol Porong-Gempo, serta lintas KA Surabaya-Banyuwang/Malang.

6. Kondisi meteorologi dan klimatologi yang masih rawan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dll, serta curah hujan yang tinggi menimbulkan cuaca buruk serta petir dan badai magnetik yang mengancam keselamatan dan kelancaran transportasi darat, laut dan udara.

B. Permasalahan

1. Gangguan Keamanan

Berbagai gangguan keamanan cenderung meningkat selama penyelenggaraan Angkutan lebaran seperti pemerasan, penipuan, pencopetan, pemaksaan dan calo-calo angkutan di terminal, stasiun, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut dan Bandar udara serta gangguan keamanan lain di beberapa ruas jalan yang rawan terhadap aksi kejahatan serta gangguan keamanan di sepanjang perjalanan kereta api.

2. Kemacetan Lalu Lintas

Kemacetan lalu lintas khususnya angkutan jalan dimungkinkan masih akan terjadi meskipun telah dieliminir agar kemacetan yang terjadi tidak dalam kurun waktu yang lama. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas serta lokasi titik rawan terjadinya kemacetan lalu lintas antara lain:

1. Persimpangan Cikopo, Jomin, Kadipaten, Purwakarta, Cileunyi, Nagrek, Pagaran (Pemalang).
2. Pasar tradisional/pasar tumpah (Pasar Sukra, Pasar Patrol, Pasar Karangampel, Pasar Sukamandi, Ciasem, Suradadi, Larangan, Cilongok, Ungaran, Ambarawa, Pasar Gebang, Pasar Tanjung, Pasar Tegal Gubug) dan pungutan /sumbangan di ruas jalan.
3. Keterbatasan kapasitas jalan pada ruas Cadas Pangeran (daerah rawan longsor), ruas Cicalengka-Nagrek-Malangbong, ruas Sadang-Subang-Cijelag, serta daerah Patrol, Pemalang - Pekalongan dan sekitarnya.
4. Belum sempurnanya penyelesaian pelebaran jalur Pantura.
5. Perlintasan Kereta Api sebidang pada ruas Prupuk-Purwokerto, ruas Kebumen-Purwokerto (Gombong-Sumpiuh) dan ruas Cicalengka-Garut.
6. Tempat pengisian BBM (SPBU) dan rumah makan khususnya di jalur Selatan P. Jawa.
7. Akibat luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas yang mengganggu lalu lintas jalan arteri dan jalan tol di wilayah Porong (Kabupaten Sidoarjo).
8. Aktivitas pariwisata seperti : Puncak di Bogor, Ciater di Lembang, Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Anyer di Banten dan Pasir Putih di Lampung, serta di Nagrek untuk wisata ke Garut dan sekitarnya.

3. Pelanggaran

Pelanggaran cenderung tetap terjadi sebagai akibat permasalahan komplek dari kelemahan hukum, eforia reformasi dan adanya lonjakan penumpang seperti pelanggaran tarif, penelantaran penumpang dan atau perlakuan yang kurang baik terhadap penumpang, pelanggaran toleransi kapasitas sarana, pelanggaran perijinan dan trayek, penggunaan truk untuk mengangkut penumpang, pelanggaran terhadap standar keselamatan kelaikan jalan serta pelanggaran lalu lintas dan angkutan.

4. **Keterpaduan Antar Moda**

Pada simpul-simpul transportasi tertentu terutama moda jalan dan moda penyeberangan masih dirasakan “bottle neck” pada pelabuhan penyeberangan, ketiadaan angkutan pendukung pada pelabuhan, tidak adanya bus kota yang melayani pada malam hari, disamping kekhawatiran masyarakat untuk melanjutkan perjalanan di malam hari karena alasan keamanan dll.

5. **Rendahnya Disiplin Berlalu Lintas**

Masih rendahnya diisiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan kesadaran akan arti pentingnya keselamatan baik operator maupun pengguna jasa transportasi menyebabkan potensi terjadinya kecelakaan cukup besar serta dapat memperburuk permasalahan kemacetan lalu lintas pada ruas Jalan.

6. **Peningkatan Jumlah Penggunaan Kendaraan Pribadi & Sepeda Motor**

Peningkatan jumlah pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor yang sangat signifikan terlihat pada pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun lalu. Khususnya pengguna sepeda motor, mereka melakukannya secara berombongan/platoon dan hal ini secara tidak langsung menyebabkan kemacetan di SPBU saat hendak mengisi bensin ataupun hanya untuk melepas lelah serta tempat – tempat istirahat pada tempat – tempat tertentu sepanjang jalur Lebaran.

7. **Kondisi Prasarana Jalan dan Jembatan**

Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan kondisi prasarana jalan dan jembatan pada jalur Lebaran 2007 (1428 H), antara lain :

a. Kerusakan jalan pada beberapa ruas pada jalur Pantura (khususnya ruas Cikampek – Cirebon), Lintas Selatan Jawa, Lintas Tengah dan Lintas Timur Sumatera.

b. Belum sempurnanya penyelesaian pelebaran jalan, pembangunan jembatan dan peningkatan jalan di wilayah Pantura.

c. Kurang memadainya Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) khususnya pada Jalan-jalan alternatif.

8. **Terbatasnya Sarana Kereta Api**

Pada umumnya kondisi sarana kereta api umur teknisnya lebih dari 30 tahun, sehingga terdapat kecenderungan akan adanya gangguan dalam pengoperasiannya.

9. Musim Hujan

Curah hujan yang tinggi diperkirakan berlangsung selama masa Angkutan Lebaran 2007 (1428 H) dapat menimbulkan berbagai macam bencana alam baik di darat, laut maupun di udara yang berupa hujan lebat, banjir, tanah longsor, angin kencang dan atau badai, arus dan atau ombak besar, kabut dan cuaca buruk serta petir dan badai magnetik yang dapat mengancam kelancaran serta keselamatan lalu lintas di darat, laut dan udara, juga dapat mengganggu sistem pos dan telekomunikasi.

10. Terbatasnya sarana dan prasarana SAR

Kemampuan sarana dan prasarana yang dimiliki Basarnas belum sepadan dengan luas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sehingga apabila terjadi kecelakaan atau bencana alam pada daerah-daerah yang jauh dari jangkauan wilayahnya, BASARNAS akan mengalami kesulitas dalam memberikan pelayanan SAR yang cepat.

V. PREDIKSI PERMINTAAN

A. Angkutan

Jumlah permintaan angkutan pada periode angkutan lebaran tahun 2007 (1428 H) secara total diperkirakan akan mencapai angka sekitar **14.968.748** orang atau **naik** sebesar **6,55%** dari jumlah penumpang pada periode angkutan lebaran tahun 2006 (1427 H) yang mencapai angka **14.047.913** orang. Adapun rincian perbandingan dan jumlah prediksi permintaan penumpang untuk masing-masing moda angkutan pada periode lebaran tahun 2007 (1428 H) adalah sebagai berikut:

NO	MODA	JUMLAH PENUMPANG		% PERTUMBUHAN (DEVIASI ± 2%)
		2006 (1427 H)	2007 (1428 H) *	
1.	ANGKUTAN DARAT	9.412.080	9.980.139	6,04
	a. Angkutan Jalan	6.772.177	7.208.241	6,44
	b. Angkutan SDP	2.639.903	2.771.898	5,00
2.	ANGKUTAN KERETA API	2.634.629	2.740.014	4,00
3.	ANGKUTAN LAUT	509.509	534.984	5,00
4.	ANGKUTAN UDARA	1.491.695	1.713.611	14,88
JUMLAH		14.047.913	14.968.748	6,55

Keterangan :
* Prediksi jumlah penumpang pada lebaran tahun 2007 (1428 H)

Perkiraan puncak mudik dan balik masing – masing moda angkutan berdasarkan data empiris pada pelaksanaan angkutan lebaran sebelumnya adalah :

MODA	PUNCAK MUDIK	PUNCAK BALIK
JALAN	11 Oktober 2007 (H-2)	20 Oktober 2007 (H+6)
ASDP	11 Oktober 2007 (H-2)	20 Oktober 2007 (H+6)
KERETA API	10 Oktober 2007 (H-3)	18 Oktober 2007 (H+4)
LAUT	6 Oktober 2007 (H-7) s/d 11 Oktober 2007 (H-2)	16 Oktober 2007 (H+2) s/d 22 oktober 2007 (H+8)
UDARA	11 Oktober 2007 (H-2)	20 Oktober 2007 (H+6)

B. Kegiatan Penunjang

1. Pelayanan Pos dan Telekomunikasi.

   a) Memberi kemudahan dalam rangka komunikasi antara petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran Terpadu 2007 (1428 H);

   b) Pemasangan sambungan baru untuk dipergunakan selama periode angkutan lebaran di Posko Pusat.

2. Pelayanan SAR

   a) Kepentingan kelancaran arus lalu lintas untuk kegiatan pengendalian dan inspeksi oleh Menteri Perhubungan dalam rangka pengendalian lalu lintas darat di 8 (delapan) wilayah pengendalian terpadu.

   b) Penanggulangan musibah pelayaran, penerbangan, bencana alam dan bencana lainnya.

3. Pelayanan Meteorologi dan Geofisika.

   Informasi yang tersedia di BMG dalam rangka mendukung Angkutan Lebaran tahun 2007 khususnya terkait dengan pelayanan jasa Meteorologi dan Geofisika untuk penerbangan dan maritim (pelayaran) serta untuk umum antara lain :

a) Informasi meteorologi
   1) Prakiraan cuaca harian (setiap 6 jam) dengan daerah prakiraan Sumatera Selatan – Jawa – Bali pada jalur darat, laut dan Udara.
   2) Prakiraan cuaca mingguan.
   3) Peringatan dini
   4) Informasi badai tropis (jika ada)
   5) Informasi liputan awan hujan
   6) Angin kencang

b) Informasi Klimatologi untuk wilayah jalur Angkutan lebaran
   1) Prakiraan sifat dan curah hujan dasarian dan bulanan.
   2) Prakiraan curah hujan tertinggi.

c) Informasi prakiraan daerah rawan banjir dan longsor di Jawa dan Sumatera (hasil kerja sama BMG, PSDA-PU, DVMBG-ESDM dan Bakosurtanal).

VI. KESIAPAN SARANA

A. Sarana Angkutan

Kesiapan sarana angkutan dalam rangka penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2007 (1428 H) untuk titik berat wilayah pengendalian seluruh jenis moda angkutan, mempunyai kapasitas angkut sebesar ± **35,14 juta** penumpang. Kondisi ini diprediksikan dapat mengangkut jumlah penumpang pada masa Angkutan lebaran yang diprediksikan berjumlah **14.968.748 penumpang**, dengan rincian kapasitas angkut untuk masing-masing moda angkutan sebagai berikut :

NO	MODA	JUMLAH ARMADA	KAPASITAS ANGKUT
1.	ANGKUTAN DARAT		
	1. Angkutan Jalan	14.449 Bus AKAP 18.909 Bus AKDP	± 15,10 Juta Pnp
	2. Angkutan Kereta Api	212 KA Reguler 14 KA Lebaran 188 Lokomotif SO 1.244 Kereta Penumpang	± 2,74 Juta Pnp
	3. Angkutan SDP	109 Kapal Ro-Ro. 12 Kapal Cepat.	± 11,37 Juta Pnp
2.	ANGKUTAN LAUT	23 Kpl PELNI 1 Kpl ASDP 31 Kpl Cepat SWASTA 416 Kpl SWASTA 53 Kpl PERINTIS 4 Kpl TNI AL	± 3,28 Juta Pnp

NO	MODA	JUMLAH ARMADA	KAPASITAS ANGKUT
3.	ANGKUTAN UDARA	48 Psw Garuda 23 Psw Merpati 11 Psw Mandala 8 Psw Trigana Air Service 16 Psw Sriwijaya 11 Psw Wings Abadi 24 Psw Metro Batavia 5 Psw Riau Airlines 5 Psw Deraya 2 Psw Travel Express 22 Psw Adam Air 26 Psw Lion Mentari 7 Psw Indonesia Air Asia 1 Psw Kartika Air 3 Psw Republic Express	± 2,65 Juta Pnp

B. Sarana Penunjang

1. Pelayanan Pos dan Telekomunikasi.

   a. Membantu dalam hal penyediaan alat komunikasi penunjang angkutan lebaran Tahun 2007 (1428 H) berupa saluran telepon, radio trunking, PSTN.

   b. Pada lebaran tahun ini akan digunakan CCTV untuk memonitor kondisi angkutan lebaran pada titik-titik lokasi tertentu yang dipandang perlu antara lain di terminal, stasiun KA, pelabuhan penyeberangan dan di beberapa titik pada jalur Pantura dan jalur Selatan P. Jawa. CCTV dioperasikan secara online di Pos Koordinasi Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2007 (1428 H) di Departemen Perhubungan, Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat.

   c. Untuk sistem informasi juga dapat dilakukan melalui internet dengan alamat Website : http://www.hubdat.web.id dan melalui SMS dengan nomor **9123 untuk informasi lalu lintas dan angkutan, Customer Care 9828**, dan **0813 8006 8000**.

2. Pelayanan SAR

   Basarnas menyiagakan dan mengoperasikan sarana dan prasarana semaksimal mungkin yang meliputi SAR Unit (SRU) udara, laut maupun darat berikut personil dan fasilitas pendukung lainnya, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor SAR, baik untuk keperluan SARNAS maupun untuk kegiatan Menteri Perhubungan beserta jajaran Pejabat yang terkait, dengan rincian sebagai berikut :

a. SRU Udara : 2 (dua) buah helicopter BO-105 ditempatkan di Landasan Udara ATS Bogor siaga on call, 2 (dua) buah helicopter BO-105 ditempatkan di Landasan Udara Juanda – Surabaya dan 1 (satu) buah helicopter BO-105 ditempatkan di Tanjung Pinang – Kepulauan Riau.

b. SRU Laut : 11 (sebelas) Rescue Boat dan 9 Sea Rider akan ditempatkan di Kantor SAR, yaitu Jakarta, Medan, Tanjung Pinang, Denpasar, Banjarmasin, Pontianak, Kendari, Makassar, Sorong, Manado, Palembang, Surabaya, Balikpapan, Ambon, Kupang dan Merauke.

c. SRU Darat : 3 (tiga) unit *Rescue Truck* disiagakan di Jakarta, Surabaya dan Denpasar, 25 (dua puluh lima) *Rescue Car* disiagakan di kantor pusat dan seluruh kantor SAR.

Dalam pelaksanaannya SRU tersebut di atas akan *stand by* dan melakukan patroli rutin di lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan di wilayah tanggung jawab SAR masing-masing. Setiap kantor SAR juga akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi/organisasi berpotensi SAR, baik pemerintah maupun swasta.

Sedangkan Ditjen Bina Marga dengan jajarannya di lapangan telah menyiapkan alat-alat beratm khususnya pada daerah rawan bencana alam.

3. Pelayanan Badan Meteorologi dan Geofisika.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada masa angkutan lebaran tahun 2007, saat ini BMG telah memberikan Pelayanan Jasa Meteorologi (cuaca) dan geofisika (gempa) pada masyarakat melalui telepon seluler dengan menggunakan ***Short Message Services (SMS)*** dengan nomor : **2303** dengan mengetik :

C1 yang diinginkan : *Lokasi; Cuaca Lokasi; Iklim Lokasi; Gempa Lokasi;*

C. Kondisi Darurat

Apabila diperlukan, kepada Panglima TNI dapat dimintakan bantuan alat angkutan baik alat angkutan darat (bus, truk), angkutan laut (kapal laut) dan angkutan udara (pesawat udara) sesuai kemampuan yang tersedia pada TNI.

VII. KESIAPAN PRASARANA

A. Moda Darat

1. Jalan dan Jembatan

Secara umum kondisi prasarana jalan dan jembatan pada jalur angkutan lebaran tahun 2007 (1428 H) di Provinsi Lampung dan Pulau Jawa dalam kondisi baik dan sedang namun di beberapa ruas Jalan dalam kondisi rusak. Adapun kondisi prasarana Jalan dan jembatan di wilayah Provinsi Lampung dan Pulau Jawa adalah sebagai berikut:

a. Provinsi Lampung

1) Jalur Utama

Jalur Utama Angkutan lebaran sebagai jalur distribusi pergerakan barang dan penumpang pada masa Angkutan lebaran tahun 2007 (1428 H) di Provinsi Lampung terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a) Jalur Lintas Barat :

Bakauheni – Kalianda – Bandar Lampung – Kota Agung – Sangi – Bangkunai – Biha – Krui – Batas Provinsi Bengkulu.

b) Jalur Lintas Tengah :

Bandar Lampung - Tegineneng – Gunung Sugih – Bandar Jaya – Simpang Terbangi Besar – Kotabumi – Bukit Kemuning – Batas Sumatera Selatan.

c) Jalur Lintas Timur :

Bakauheni – Ketapang – Labuhanmaringgai – Sukadana – Terbangi Besar – Menggala - Sp. Pematang – Batas Sumatera Selatan

Sebagian besar pergerakan arus lalu lintas menggunakan 2 (dua) lintas utama yaitu Lintas Tengah dan Lintas Timur Sumatera, hal ini disebabkan karena waktu perjalanan yang dibutuhkan lebih cepat dan ketersediaan faktor penunjang seperti rumah makan, stasiun BBM, tempat peristirahatan lebih baik jika dibandingkan dengan jalur lintas Barat Sumatera.

Total Jalur Utama Angkutan Lebaran di Provinsi Lampung sepanjang 652,94 Km.

2) Jalur Alternatif

Disamping jalur utama Angkutan lebaran 2007 (1428 H), telah disiapkan jalur alternatif yang dapat digunakan oleh pelaku perjalanan untuk mengalihkan arus lalu lintas dalam rangka membantu kelancaran arus lalu lintas di wilayah Provinsi Lampung, antara lain :

a) Jalur Alternatif I (331,47 Km) :

Bakauheni – Gayam – Lb. Maringgai – Sukadana - Gedong Dalam – Gunung Sugih.

b) Jalur Alternatif II (144,33 Km) :

(1) Sp. Pugung - Gd. Tataan - Pringsewu - Bandung Baru - Kalirejo - Sp. Kuripan/Pd. Ratu - Gunung Sugih.

(2) Sp. Pugung - Gd. Tataan - Pringsewu - Bandung Baru - Kalirejo - Pd. Ratu - Aji Keagungan.

3) Jembatan

Berdasarkan data dari Departemen Pekerjaan Umum, jumlah jembatan yang terdapat di Provinsi Lampung pada Jalan Nasional sampai dengan tahun 2007 sebanyak 25 buah dimana umur jembatan yang lebih dari 20 tahun sebanyak 9 buah. Kondisi jembatan di Provinsi Lampung secara umum baik.

b. Provinsi Banten

1) Jalur Utama

Jalur Utama Angkutan lebaran sebagai jalur distribusi pergerakan barang dan penumpang pada masa Angkutan lebaran tahun 2007 (1428 H) di Provinsi Banten terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a) Ruas Jalan Arteri Jakarta – Merak
Kondisi ruas jalan arteri Jakarta – Merak sepanjang 107 Km rata-rata dalam kondisi cukup baik/hotmix.

b) Ruas Jalan Tol Jakarta – Merak

Ruas Jalan Jakarta – Cilegon, Pintu Tol Gerem (90 km), seluruh ruas jalan merupakan ruas jalan tol. Kondisi jalan Tol Jakarta – Pintu Tol Gerem (Cilegon) secara umum dalam kondisi baik dikarenakan adanya pemeliharaan rutin.

2) Jalur Alternatif

Disamping jalur utama Angkutan lebaran 2007 (1428 H), telah disiapkan jalur alternatif untuk mengalihkan arus lalu lintas dalam rangka membantu kelancaran arus lalu lintas di wilayah Provinsi Lampung, antara lain :

a) Ruas Jalan Pelabuhan Merak–Suralaya–Bojonegara–Serdang–Pintu Tol Cilegon Timur sepanjang 29,5 Km. Kondisinya secara umum baik dan pada ruas km 4,5 sampai dengan km 16,8 kondisi jalan dalam keadaan rusak berat dan berlubang.

b) Ruas Jalan Cilegon – Labuan – Pandeglang – Rangkasbitung – Batas Jabar (106 Km)
c) Ruas Jalan Cikande – Rangkasbitung – Batas Jabar (61 Km).
d) Ruas Jalan Serang – Palima – Ciomas – Padarincang – Cinangka/Anyer (51 Km)

c. Provinsi Jawa Barat

1) Jalur Utama

Jalur Utama Angkutan lebaran sebagai jalur distribusi pergerakan barang dan penumpang pada masa Angkutan lebaran tahun 2007 (1428 H) di Provinsi Jawa Barat dengan jalur utama yaitu :

a) Jalur Pantai Utara melalui *Jakarta - Cikampek - Pamanukan - Indramayu - Jatibarang - Palimanan - Cirebon - Batas Jateng.*
b) Jalur Tengah melalui *Sadang - Purwakarta - Cikalong Wetan - Bandung - Sumedang - Kadipaten - Palimanan.*
c) Jalur Selatan melalui *Jakarta - Bogor - Cianjur - Padalarang - Bandung - Tasikmalaya - Ciamis - Banjar.*
d) Jalan Tol Jakarta – Cikampek
e) Jalan Tol Jakarta – Cikampek – Cileunyi (Purbaleunyi).
f) Jakarta - Tol Jagorawi - Puncak - Cianjur - Bandung.
g) Jakarta - Tol Jagorawi - Ciawi - Sukabumi - Bandung.

Secara umum kondisi prasarana jalan dan jembatan pada jalur angkutan lebaran tahun 2007 (1428 H) di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi baik sedang dan mengalami peningkatan/penambahan kapasitas dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada beberapa ruas terdapat peningkatan/perbaikan jalan yang menghambat arus lalu lintas yang ada dan diharapkan selesai sebelum penyelenggaraan Angkutan Lebaran.

Terdapat pelebaran pada Km. 67+200 atau pada persimpangan tol Cikampek – Tol Cipularang dari Bandung ke Jakarta dan direncanakan selesai sebelum masa penyelenggaraan Angkutan Lebaran.

2) Jalur alternatif

Jalur alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi beban lalu lintas pada jalur utama angkutan lebaran di Provinsi Jawa Barat antara lain :

a) Jakarta - Tol Jagorawi - Cibubur - Jonggol - Cianjur - Bandung.
b) Purwakarta - Wanayasa - Jalan Cagak - Cimalaka (Sumedang).
c) Pamanukan - Subang - Jalan Cagak - Bandung.
d) Malangbong - Wado - Sumedang.
e) Sumedang - Kadipaten - Jatitujuh - Jatibarang.
f) Ciamis - Kawali - Cikijing - Kuningan - Cilimus - Cirebon.

d. Provinsi Jawa Tengah

1) Jalur Utama

Jalur Utama Angkutan lebaran sebagai jalur distribusi pergerakan barang dan penumpang pada masa Angkutan lebaran tahun 2007 (1428 H) di Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

a) Jalur Pantura ; *Ruas jalan Losari/Pejagan - Brebes - Tegal - Pemalang - Pekalongan - Batang - Kendal – Semarang – Demak – Rembang.*

b) Jalur Tengah ;
   (1) *Ruas Jalan Tegal/Pejagan - Prupuk - Bumiayu - Purwokerto.*
   (2) *Ruas jalan Semarang - Ungaran - Bawen - Ambarawa - Magelang - Yogyakarta.*
   (3) *Ruas jalan Purwokerto - Purbalingga - Banjarnegara - Wonosobo - Temanggung – Bawen – Salatiga - Boyolali - Solo.*
   (4) *Semarang–Bawen–Salatiga–Solo–Klaten–Yogyakarta.*

c) Jalur Selatan ; *Ruas jalan Batas Jawa Barat - Wangon - Banyumas - Kebumen - Purworejo - Yogyakarta.*

Secara umum kondisi prasarana jalan dan jembatan pada jalur angkutan lebaran tahun 2007 (1428 H) di Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik dan sedang.

Di sepanjang Jalur Pantura sedang dilakukan pekerjaan perbaikan/peningkatan ruas Jalan, jembatan dan overlay yang direncanakan selesai dan siap digunakan pada penyelenggaraan Angkutan lebaran.

Penyempitan ruas jalan pada Km. 19 dari Tegal tepatnya persimpangan Pagaran Pemalang dari 4 lajur 2 arah menjadi 2 lajur 2 arah merupakan potensial menyebabkan kemacetan.

Pada ruas jalan Pemalang – Pekalongan sedang dilakukan pekejaan perbaikan dan pelebaran jalan dengan beton konkrit dari 2 lajur 2 arah menjadi 3 lajur 2 arah, sebagian besar telah selesai dikerjakan dan dalam tahap penyelesaian namun beberapa masih dalam tahap pengerukan. Pekerjaan ini diharapkan dapat selesai sebelum periode lebaran 2007 karena akan sangat mempengaruhi kelanaran lalu lintas di Jalur Pantura.

3) Jalur alternatif

Jalur alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi beban lalu lintas pada jalur utama angkutan lebaran di Provinsi Jawa Tengah antara lain :

a) Pejagan - Ketanggungan - Prupuk.
b) Pemalang - Purbalingga
c) Weleri - Parakan - Temanggung.
d) Kuningan – Cileduk – Ketanggungan – Slawi – Tegal.

2. Lalu Lintas Jalan

Distribusi lalu lintas arus mudik dan balik periode Angkutan Lebaran 2007/1428 H. Berdasarkan hasil perhitungan lalu lintas tahun 2006 pada masa pelayanan Angkutan Lebaran 2006/1427 H diketahui arus lalu lintas :

a. Arus Lalu Lintas Non Sepeda motor

Dari hasil perhitungan diperkirakan total volume lalu lintas non sepeda motor (kendaraan roda 4 atau lebih) untuk masa Angkutan Lebaran 2007/1428 H akan mengalami **peningkatan** sebesar **7,73%** dari masa Angkutan Lebaran 2006/1427 H yaitu dari **1.746.617** kendaran menjadi **1.881.655** kendaraan. Perkiraan total volume lalu lintas tanpa sepeda motor dan trendline total volume lalu lintas tanpa sepeda motor untuk masa Angkutan Lebaran 2007/1428 H dapat dilihat pada tabel :

Masa Angkutan Lebaran	Total Volume Kendaraan
2003 (1424 H)	1,580,043
2004 (1425 H)	1,657,700
2005 (1426 H)	1,582,118
2006 (1427 H)	1,746,617
2007 (1428 H)	**1,881,655 *)**

*) perkiraan

b. Arus Lalu Lintas Sepeda Motor

Sedangkan untuk volume arus lalu lintas sepeda motor pada masa Angkutan Lebaran 2007/1428 H berdasarkan hasil perhitungan diperkirakan mengalami **peningkatan** sebesar **31,29%** dari masa Angkutan Lebaran 2005/1426 H yaitu dari **1.856.619** kendaraan menjadi **2.437.572** kendaraan. Perkiraan total volume lalu lintas sepeda motor dan trendline total volume lalu lintas sepeda motor untuk masa Angkutan Lebaran 2007/1428 H dapat dilihat pada tabel :

Masa Angkutan Lebaran	Total Volume Kendaraan
2003 (1424 H)	711,348
2004 (1425 H)	793,340
2005 (1426 H)	1,297,433
2006 (1427 H)	1,856,619
2007 (1428 H)	**2,437,572*)**

*) perkiraan

3. Terminal Bus

Terminal Bus yang dipersiapkan di 8 Provinsi dengan pengendalian terpadu berjumlah 29 terminal bus utama dan 11 terminal bus bantuan.

NO	PROVINSI	TERMINAL UTAMA	TERMINAL BANTUAN
1.	LAMPUNG	Rajabasa	St. DAMRI Bd. Lampung
2.	DKI JAKARTA	1) Lebakbulus 2) Kalideres 3) Pulogadung 4) Kp. Rambutan	1) Rawamangun 2) Tanjung Priok 3) Grogol 4) St. DAMRI Kemayoran 5) Muara Angke 6) Tanah Merdeka 7) Pinang Ranti 8) Rawabuaya 9) Kapten Tendean 10) Pool bus
3.	JAWA BARAT	1) Baranangsiang 2) Bekasi 3) Leuwi Panjang 4) Cicaheum 5) Cileunyi 6) Harjamukti 7) Banjar 8) Depok 9) Cilembang 10) Garut	-
4.	BANTEN	1) Merak 2) Pakupatan	-
5.	JAWA TENGAH	1) Tegal 2) Purwokerto 3) Terboyo 4) Tirtonadi	-
6.	DI YOGYAKARTA	1) Giwangan 2) Jombor 3) Wonosari	-
7.	JAWA TIMUR	1). Osowilangun 2). Bungurasih 3). Madiun 4). Malang	-
8.	BALI	Ubung	-
JUMLAH		**28**	**11**

4. Perkeretaapian

Pada saat ini terdapat pekerjaan di beberapa titik pada lintas – lintas tersebut baik perbaikan track maupun jembatan/terowongan sehingga diperlukan beberapa tindakan agar keselamatan dalam pengoperasian kereta api tetap terjamin, antara lain dengan pengurangan kecepatan.

Kondisi prasarana persinyalan, telekomunikasi dan pelistrikan (sintelis) di beberapa tempat masih menggunakan sistem persinyalan mekanik, namun demikian fungsi dari peralatan tersebut kehandalannya tidak berbeda dengan peralatan persinyalan elektrik.

Pengendalian pengoperasian moda kereta api akan dikendalikan secara terpadu yang berada pada 8 (delapan) lokasi CTC (Central Traffic Control).

Jaringan jalan dan jembatan kereta api serta kelengkapan keselamatannya seperti sinyal dan telekomunikasi sedang dipersiapkan untuk menampung melonjaknya frekuensi perjalanan kereta api melalui 9 Daop yang siap untuk dilakukan pengendalian secara terpadu yaitu : Daop I DKI Jakarta, Daop II Bandung, Daop III Cirebon, Daop IV Semarang, Daop V Purwokerto, Daop VI Yogyakarta, Daop VII Madiun, Daop VIII Surabaya dan Daop IX Jember.

5. Penyeberangan

Lintasan Penyeberangan yang dilakukan pemantauan terkait dengan Posko Terpadu dilakukan pada 7 (tujuh) lintas penyeberangan yaitu : Lintas Merak – Bakauheni (Jawa – Sumatera), Ujung – Kamal (Jawa – Madura), Ketapang – Gilimanuk (Jawa – Bali), Padangbai – Lembar (Bali – Lombok), Palembang – Muntok (Sumatera – Bangka), Bajoe – Kolaka (Sulsel-Sultra) dan Kayangan – Pototano (NTB).

Jumlah dermaga dan fasilitas penunjang, yang tersedia pada 7 (tujuh) lintas penyeberangan adalah sebagai berikut :

No.	Rute Penyeberangan	Jumlah Dermaga	Fasilitas Dermaga
1.	Merak – Bakauheni	4 Dermaga MB 1 Dermaga Pontom	Movable Bridge, Gangway, Elevated Side Ramp, dll.
2.	Ujung – Kamal	3 Dermaga MB 1 Dermaga Plengsengan 1 Dermaga Ponton	Movable Bridge, Gangway, Terminal, dll.
3.	Ketapang – Gilimanuk	2 Dermaga MB 3 Dermaga Plengsengan / Beaching 1 Dermaga Ponton	Movable Bridge, Ponton, Gangway, Terminal, dll.
4.	Padangbai – Lembar	1 Dermaga MB 1 Dermaga Plengsengan	Movable Bridge, Terminal, dll.

No.	Rute Penyeberangan	Jumlah Dermaga	Fasilitas Dermaga
5.	Palembang – Muntok	1 Dermaga MB 1 Dermaga Ponton	Movable Bridge, Ponton, Terminal, dll.
6.	Bajoe – Kolaka	1 Dermaga MB 1 Dermaga Plengsengan	Movable Bridge, Terminal, dll.
7.	Kayangan - Pototano	2 Dermaga MB	Movable Bridge, Terminal, dll.

B. Moda Laut

Terdapat 52 pelabuhan yang akan dilakukan pemantauan/pengendalian terpadu di seluruh Indonesia yaitu : Belawan, Sibolga, Tg. Balai Asahan, Dumai, Pekanbaru, Sei Pakning, Kendari, Selat Panjang, Batam, Tg. Batu, Tg. Uban, Tg. Pinang, Sei Kolak Kijang, Tg. Pandan, Pkl. Balam/Blinyu, Jambi/Kuala Tungkal, Palembang, Teluk Bayur, Tg. Priok, Benoa, Tg. Mas, Gresik, Tg. Perak, Pontianak, Kumai, Sampit, Banjarmasin, Tg. Balai Karimun, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Nunukan, Makasar, Pare – Pare, Pantoloan, Bitung, Gorontalo, Tual, Bau – Bau, Siwa, Lembar, Kupang, Ternate, Ambon, Jayapura, Biak, Sorong, Merauke, Manado, Namlea, Sanana, Manokwari.

C. Moda Udara

Pengendalian akan dikendalikan secara terpadu pada 23 bandar udara di seluruh Indonesia yaitu : Soekarno Hatta (Jakarta), Juanda (Surabaya), Hasannudin (Makasar), Polonia (Medan), Ngurah Rai (Denpasar), Samsuddin Noer (Banjarmasin), Sepinggan (Balikpapan), Ahmad Yani (Semarang), Juwata (Tarakan), El Tari (Kupang), Adi Soetjipto (Yogyakarta), Sultan Syarief Kasim II (Pekanbaru), Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Supadio (Pontianak), Hang Nadim (Batam), Minangkabau (Padang), Depati Amir (Pangkal Pinang), Adi Soemarmo (Solo), Sam Ratulangi (Manado), Selaparang (Mataram), Sultan Thaha (Jambi), Sultan Baabullah (Maluku Utara), Mutiara (Palu).

Sementara itu, untuk bandar udara yang dipantau dalam rangka Angkutan Lebaran luar negeri sebanyak 4 bandar udara yaitu Soekarno Hatta (Jakarta), Juanda (Surabaya), Polonia (Medan) dan Ngurah Rai (Denpasar).

VIII. KEBIJAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN.

Meningkatkan kualitas keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat dalam suasana serba keterbatasan serta melaksanakan penyelenggaraan angkutan lebaran 2007 (1428 H) secara tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat melalui berbagai upaya sebagai berikut :

A. Umum.

1. Mengutamakan faktor keselamatan dan kelancaran lalu lintas darat, laut dan udara serta keterpaduan intra dan antar moda;

2. Melakukan sosialisasi dan publikasi atas seluruh kebijaksanaan dan pengaturan angkutan lebaran 2007 (1428 H) kepada seluruh lapisan masyarakat, operator angkutan dan petugas pelaksana, berupa penyebaran peta resmi jalur lebaran kepada para pemudik, pemasangan spanduk sosialisasi dan publikasi di sepanjang jalur lebaran.

3. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan publikasi melalui media cetak, elektronik maupun jaringan informasi lainnya secara intens yang mencakup kesiapan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, dan udara) dan antisipasi permasalahan-permasalahan menonjol yang mungkin terjadi (bencana alam dan kecelakaan).

4. Dengan mengutamakan faktor keselamatan, dilakukan optimasi daya angkut sarana angkutan penumpang umum dengan memberikan dispensasi muatan ***10%*** di atas ketentuan yang berlaku untuk bus, ***50%*** untuk kereta api kelas ekonomi dan ***30 %*** untuk kereta api kelas bisnis dan maksimum ***30%*** untuk kapal laut dan ferry penyeberangan **yang disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas peralatan keselamatan**.

5. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi angkutan lebaran 2007 (1428 H) yang lebih cepat dan akurat dengan penggunaan CCTV, SMS dengan nomor **9123 untuk informasi lalu lintas dan angkutan, Customer Care 9828**, dan **0813 8006 8000** serta website : www.hubdat.web.id.

6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor terkait.

7. Meningkatkan penertiban, pengaturan, pengamanan dan pengawasan secara terkoordinasi dalam penyelenggaraan angkutan lebaran.

8. Harga tarif angkutan darat, kereta api, laut dan udara dicantumkan secara jelas di loket dan tiket sedangkan untuk angkutan darat khususnya bus umum tarif angkutan dicantumkan dengan jelas di dalam bus.

B. Transportasi Darat.

1. Dalam rangka peningkatan kelancaran arus lalu lintas di sepanjang jalur lebaran di pulau Jawa, maka dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Perhubungan Darat tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2007 (1428 H), yang antara lain berisi :

   a). Melakukan pengendalian dan pengaturan lalu lintas apabila terjadi kemacetan lalu lintas pada jalur utama di Pulau Jawa, dengan pengalihan lalu lintas secara dinamis dan situasional terhadap kendaraan **angkutan penumpang tidak umum** dan kendaraan **angkutan barang** ke jalur utama lainnya atau ke jalur alternatif.

   b). Melakukan pengaturan lalu lintas berupa pelarangan dioperasikannya truk pengangkut bahan bangunan dan truk bersumbu lebih dari 2 (dua), truk tempelan, truk gandengan dan kontainer mulai tanggal **9 Oktober**

2007 (H-4) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 14 Oktober 2007 (H1) pukul 24.00 WIB di Pulau Jawa, kecuali untuk angkutan BBM, ternak, bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabe merah, bawang merah, kacang tanah, daging sapi, daging ayam dan telur), pupuk, susu murni dan barang antaran pos.

c). Untuk pengangkutan barang-barang ekspor/impor dengan kontainer yang menuju/dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Tanjung Mas serta sebaliknya tidak diperbolehkan beroperasi kecuali mendapat persetujuan tertulis (dispensasi) yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi tempat asal keberangkatan kendaraan dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada jalur utama Angkutan Lebaran 2007/1428 H.

d). Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi di seluruh Indonesia untuk menutup pengoperasian seluruh jembatan timbang mulai tanggal **6 Oktober 2007 (H-7) pukul 00.00 waktu setempat s/d tanggal 21 Oktober 2007 (H+7) pukul 24.00 waktu setempat**.

e). Melakukan pelarangan penggunaan mobil barang dengan bak terbuka untuk mengangkut penumpang.

2. Dikeluarkan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat tentang Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor sebagai Sarana Angkutan pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2007 (1428 H) yang mengatur tentang pelaksanaan pengaturan/pengawasan penggunaan sepeda motor selama masa angkutan lebaran 2007 (1428 H) untuk moda angkutan jalan mulai tanggal **6 Oktober 2007 (H-7) pukul 00.00 waktu setempat s/d tanggal 21 Oktober 2007 (H+7) pukul 24.00 waktu setempat** yang memuat ketentuan antara lain :

a) Setiap sepeda motor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

b) Setiap pengendara sepeda motor baik pengemudi maupun penumpang wajib menggunakan helm;

c) Melarang penggunaan sepeda motor dengan kereta samping ataupun sepeda motor beroda tiga (modifikasi);

d) Cara penempatan barang tidak boleh melebihi lebar kemudi, agar keseimbangan berkendaraan tetap terjaga dan tidak mengganggu arus lalu lintas dan pengguna jalan lainnya;

e) Setiap sepeda motor **hanya** diperkenankan mengangkut 2 orang penumpang, termasuk anak-anak;

f) Setiap pengendara sepeda motor wajib menjaga jarak aman saat berjalan beriringan dan tidak diperkenankan untuk berjalan berdampingan kecuali dalam keadaan/kondisi khusus, dengan kecepatan maksimum 80 km/jam;

g) Menggunakan jalur lambat, jika tidak memungkinkan atau tidak tersedia jalur lambat dapat menggunakan jalur utama pada lajur paling kiri;

h) Untuk keselamatan, kepada pengendara sepeda motor dihimbau untuk menggunakan lampu utama dekat ketika dalam perjalanan walaupun siang hari.

3. Kepada para petugas terminal, dihimbau untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan peralatan tanggap darurat untuk setiap bus yang hendak berangkat sebagai salah satu upaya peningkatan keselamatan penumpang.

4. Selama masa Angkutan Lebaran 2007 (1428 H) agar dihindarkan segala bentuk kegiatan yang dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas lebaran. Bus angkutan lebaran bergerak langsung menuju ke kota tujuan dan hanya berhenti di Terminal Bus sesuai dengan Kartu Pengawasan.

C. Transportasi Kereta Api

1. Melakukan pengendalian dan pengaturan lalu lintas dengan penambahan perjalanan kereta api angkutan Lebaran dengan MALKA, penambahan rangkaian, cadangan untuk pengoperasian kereta api “V–Slag”, pembatalan KA barang, kecuali untuk kebutuhan pokok dan strategis (BBM).
2. Pada kondisi darurat dengan melihat kebutuhan pasar dapat dipergunakan Wesel stel (kereta cadangan) yang ada di Surabaya, Yogyakarta dan Gambir.
3. Apabila terjadi kecelakaan atau bencana alam, maka skenario operasinya :
   a. Malka jalan memutar
   b. Service Recovery (KA lambat yang melebihi batas toleransi)
   c. Penanganan penumpang yang tidak terangkut
4. Pembentukan Tim penanggulangan Rinja (Rintang Jalan) di 7 lokasi (Jakarta, Bandung, Purwokerto, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Cirebon).
5. Pembentukan posko daerah di 9 lokasi (Daop I Jakarta, Daop II Bandung, Daop III Cirebon, Daop IV Semarang, Daop V Purwokerto, Daop VI Yogyakarta, Daop VII Madiun, Daop VIII Surabaya dan Daop IX Jember).
6. Dalam hal ticketing, untuk mengurangi konsentrasi calon penumpang di stasiun, diupayakan :
   a. penambahan loket penjualan
   b. memperpanjang waktu penjualan dengan membuka loket lebih awal
   c. pembuatan loket pelayanan cepat dengan mensyaratkan uang pas
   d. pengelompokan penjualan karcis di loket berdasarkan koridor perjalanan kereta api
   e. tidak melayani angkutan terusan
7. Mengeluarkan surat pemberhentian pekerjaan dari H-7 s/d H+7 pada semua pekerjaan di lintas.

D. Transportasi Laut.

1. Memberikan prioritas pelayanan sandar kapal penumpang dan hewan serta kapal perintis dan kapal ro – ro serta kapal pengangkut bahan pokok (beras dan gula).

2. Memberikan dispensasi secara selektif terhadap kapal barang untuk mengangkut penumpang sesuai ketentuan yang berlaku (kapal – kapal perintis).

3. Meningkatkan kewaspadaan, kelancaran, ketertiban, keamanan & keselamatan prasarana & sarana transportasi laut.

4. Memberikan dispensasi kelebihan penumpang sesuai ketentuan keselamatan pelayaran bagi kapal penumpang dan ro – ro.

5. Meminta dukungan pengoperasian kapal TNI AL dlm rangka mengatai kekurangan kapasitas kapal berdasarkan kebutuhan yg nyata.

6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait : Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan.

7. Pengaturan untuk tidak melakukan docking pada saat peak season bagi kapal – kapan penumpang dan ro – ro.

8. Meningkatkan kewaspadaan keamanan di pelabuhan dan di kapal sesuai Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 145/PHBL-05.

E. Transportasi Udara.

1. Menyiapkan secara maksimal prasarana dan sarana angkutan udara.

2. Mengatur dan menertibkan angkutan lebaran supaya lancar, aman, tertib, tepat waktu dan nyaman.

3. Meningkatkan keselamatan penerbangan dan meningkatkan pengawasan.

4. Meningkatkan keamanan dan ketenangan penumpang dalam perjalanan.

5. Menyiapkan kebijakan tarif harga jual perusahaan angkutan udara niaga berjadwal pada masa angkutan Lebaran 2007 harus tetap menjamin keselamatan penerbangan dan kelangsungan hidup perusahaan dengan mengacu pada ketentuan :

   a. KM 9 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi.

   b. KM 11 Tahun 2007 tentang Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas ekonomi.

F. Pos dan Telekomunikasi.

1. Meningkatkan layanan jasa pos antara lain dengan :

   a. Menyediakan loket/tempat khusus di beberapa gedung perkantoran besar yang menyediakan kartu lebaran dan sekaligus berfungsi sebagai tempat penerimaan/pengiriman kartu lebaran, yang diberi nama “Pojok Lebaran”.

   b. Mempekerjakan karyawan lepas yang berasal dari para pensiunan pos dan pelajar untuk melayani lonjakan produksi jasa pos.

   c. Menyediakan sarana dan fasilitas tambahan pelayanan pos.

2. Melakukan pengamanan Sistem Komunikasi Angkutan Lebaran 2007 (1428 H) dengan melaksanakan monitoring spektrum frekuensi radio.

G. SAR

1. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2007 Basarnas secara umum disesuikan dengan kebijakan Menteri Perhubungan.

2. Penanganan operasi SAR baik untuk musibah pelayaran, penerbangan maupun musibah/bencana lainnya, dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasi yang berlaku.

3. Prosedur bantuan untuk operasi SAR terhadap bencana dan musibah transportasi darat/kereta api, dilaksanakan dengan memperbantukan unit SAR pada SATLAK PB untuk bencana alam dan unit LLAJ/PT.KAI bersama dengan potensi SAR lainnya.

IX. PENGATURAN DAN PENGENDALIAN

A. Umum

1. Menyediakan, menyelenggarakan, mengamankan dan mengatur arus lalu lintas dan angkutan darat, laut dan udara serta mengupayakan keselamatan selama perjalanan dari Jakarta dan kota – kota lainnya ke tempat tujuan dengan tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Penyelenggaraan angkutan lebaran dilaksanakan berlandaskan prinsip keterpaduan antar angkutan darat, kereta api, laut dan udara, didukung oleh seluruh kegiatan penunjang terkait.

3. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pelayanan pos dan telekomunikasi bagi masyarakat, serta bagi dukungan penyelenggaraan angkutan lebaran.

4. Di setiap Provinsi, oleh Gubernur dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tingkat Provinsi terdiri dari berbagai unsur terkait serta mengikutsertakan potensi masyarakat.

5. Di setiap Kabupaten/Kota, oleh Bupati/Walikota dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tingkat Kabupaten Kota yang terdiri dari berbagai unsur terkait serta mengikutsertakan potensi masyarakat.

6. Dengan mempertimbangkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat mengatur dan mengendalikan tempat – tempat istirahat untuk pengendara sepeda motor.

7. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan secara intensif akan dilakukan upaya-upaya untuk pengendalian/pencegahan terjadinya percaloan di tempat pelayanan angkutan (terminal bus, stasiun KA, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut dan bandar udara).

8. Dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal, bekerjasama YLKI akan dilakukan pemantauan terhadap pelayanan jasa angkutan dengan menampung keluhan-keluhan masyarakat.

B. Transportasi Darat.

1. Melihat posisi DKI Jakarta sebagai pusat penyebaran pemudik menggunakan moda jalan, maka arus lalu lintas kendaraan penumpang dari Jakarta bergerak menuju tiga jurusan utama dengan menggunakan angkutan jalan baik jalan tol maupun jalan arteri, dan lintas penyeberangan sebagai berikut :

   a. Arah Timur melalui jalur Pantura (Jalur Pantai Utara (Pantura) dengan ruas jalan (Jalan Tol Jakarta–Cikampek)–Pamanukan–Lohbener–Cirebon – Brebes – Tegal – Semarang – Kudus – Rembang – Tuban – Babat–Lamongan–Gresik–Surabaya–Sidoarjo–Pasuruan–Probolinggo – Situbondo - Ketapang.).

   b. Arah Timur menuju jalur Selatan (Jalur Selatan dengan ruas jalan (Jalan Tol Jakarta – Cikampek) – (Jalan Tol Purbaleunyi) – Nagrek – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar – Majenang – Wangon – Kebumen – Purworejo – Yogyakarta - Wonosari – Pacitan – Jetis – Tenggalek – Tulungagung – Blitar – Kepanjen – Pronojiwo – Lumajang – Jatiroto – Rambipuji – Jember – Banyuwangi – Ketapang.).

   c. Arah Barat menuju Merak - Bakauheni (Sumatera).

2. Untuk menghindari ruas jalan Sidoarjo – Porong – Gempol akibat luapan lumpur panas di daerah Porong (Kabupaten Sidoarjo) melalui jalur Selatan, sedangkan lalu lintas regional dan lokal menggunakan jalan-jalan alternatif yang ditentukan.

3. Pada setiap Ibukota Provinsi agar dilakukan pemantauan dan pengaturan pergerakan pemudik yang keluar/masuk selama periode Angkutan Lebaran 2007 (1428 H) baik di ruas jalan maupun di Terminal-terminal utama maupun bantuan.

4. Untuk menghindari penumpukkan arus lalu lintas pada lokasi-lokasi yang rawan terjadinya kemacetan dan bencana alam akan dikembangkan pola pemantauan arus lalu lintas menggunakan Sistem Wilayah. Pengendalian arus lalu lintas dilakukan oleh petugas yang tergabung dalam *tim Mobile* atau petugas monitoring dari Pusat/Daerah dengan pembagian wilayah dan lokasi-lokasi rawan sebagai berikut :

   1) WILAYAH CILEGON, SERANG DAN MERAK
      Lokasi - lokasi:
      a) Penyeberangan Merak – Bakauheni
      b) Jalan alternatif Merak – Bojonegara – Serang Timur
      c) Ujung Fly Over Merak
      d) Ruas tol Jakarta – Merak
      e) Simpang Gerem
      f) Jalur wisata Serang – Anyer
      g) Terminal Merak
      h) Persimpangan Cilegon (Gerem) – Merak

   2) WILAYAH KARAWANG, PURWAKARTA DAN SUBANG
      Lokasi-lokasi :
      a) Ujung Tol Cikopo
      b) Simpang Jomin
      c) Simpang Sadang
      d) Jalur Alternatif Sadang – Subang
      e) Ruas tol Jakarta - Cikampek
      f) Jalur Wisata Ciater/Tangkubanperahu – Lembang
      g) Pasar Sukamandi, Sukra
      h) Pasar Ciasem

   3) WILAYAH INDRAMAYU, CIREBON DAN MAJALENGKA
      Lokasi-lokasi :
      a) Pasar Patrol
      b) Pasar Gebang
      c) Pasar Kandanghaur
      d) Pasar Tegalgubug
      e) Pasar Karang Ampel
      f) Pasar Kertasemaya
      g) Pasar Bulak Kamba
      h) Simpang Lohbener
      i) Simpang Kadipaten
      j) Simpang Cijelag
      k) Jalur Alternatif Subang – Cikamurang – Cijelag
      l) Jalur Alternatif Kadipaten – Jatitujuh – Jatibarang
      m) Terminal Cirebon

4) WILAYAH BOGOR, CIANJUR DAN SUKABUMI
Lokasi-lokasi :
a) Jalur Alternatif Jonggol – Cianjur
b) Jalur Wisata Puncak
c) Jalur alternatif Ciawi – Sukabumi – Cianjur
d) Pasar Caringin, Cicurug, Cibadak
e) Simpang Ciawi
f) Ruas Cianjur – Ciranjang – Karang Tengah.

5) WILAYAH BANDUNG, SUMEDANG DAN GARUT
Lokasi-lokasi :
a) Padalarang
b) Ruas jalan Karang Tengah - Padalarang
c) Ruas Sumedang – Cileunyi (Cadas Pangeran)
d) Ruas tol Purbaleunyi
e) Simpang ujung tol Cileunyi
f) Pasar Pabrik Kahatex dan sekitarnya
g) Ruas Cileunyi – Nagrek - Malangbong
h) Perlintasan Sebidang Cicalengka
i) Jalur Alternatif Wado – Malangbong
j) Daerah rawan longsor pada ruas jalan Ciamis – Kawali Km 148 Bandung atau Km 4 Kawali
k) Pintu tol Pasteur – Sarijadi – Pasopati

6) WILAYAH BREBES, TEGAL DAN BUMIAYU
Lokasi-lokasi :
a) Pasar Surodadi antara Pemalang – Tegal.
b) Jalur alternatif Tanjung – Ketanggungan – Prupuk, Kuningan – Cileduk – Slawi.
c) Pada km 12 Ketanggungan, terdapat pasar Larangan yang berpotensi menyebabkan kemacetan.
d) Perlintasan Sebidang berpintu 53 Prupuk pada pertigaan Cirebon – Tegal – Prupuk
e) Perlintasan sebidang berpintu 293 Karang Sawah – Prupuk
f) Pada pertigaan jalan lingkar Bumiayu dari arah Purwokerto, terdapat terminal yang telah melebihi kapasitas, sehingga banyak kendaraan angkutan umum yang ngetem di pertigaan (di pinggir jalan)
g) Ruas jalan Pemalang – Comal – Pekalongan

7) WILAYAH BANYUMAS, KEBUMEN DAN PURWOREJO
Lokasi-lokasi :
a) Hambatan Keluar/Masuk Kendaraan Ke SPBU dan rumah makan
b) Ruas Kebumen – Gombong (Rawan Banjir)
c) Ruas Bumiayu – Ajibarang – Wangon (Rawan Longsor)
d) Ruas Wangon – Lumbir – Majenang (rawan longsor)
e) Perlintasan sebidang Sumpiuh
f) Perlintasan sebidang Karanganyar

8) Posko Terminal

Arus Mudik :
- Terminal Pulogadung
- Terminal Kampung Rambutan
- Terminal Kalideres
- Terminal Lebak Bulus
- Terminal Damri Kemayoran
- Terminal Merak

Arus Balik :
- Terminal Solo
- Terminal Yogyakarta
- Terminal Purwokerto
- Terminal Tegal
- Terminal Merak

5. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan pokok, yaitu Kegiatan Pemberangkatan (Arus Mudik), Kegiatan Pengamanan dan Pengaturan lalu lintas dan angkutan sepanjang jalur lebaran serta Kegiatan Arus Balik.

a). Kegiatan Pemberangkatan

1) Penyelenggaraan dan pengaturan pemberangkatan diarahkan untuk mendorong masyarakat melaksanakan mudik lebaran secara tidak bersamaan.

2) Mendorong dan mengembangkan agar perusahaan swasta dapat menyediakan angkutan mudik gratis (sistem charter), hal ini sangat membantu pemudik serta dapat mengurangi kepadatan karena diberangkatkan sebelum periode puncak.

3) Mendorong manajemen perusahaan swasta untuk memberikan THR secara dini kepada para pekerja dan pegawai sehingga dapat memanfaatkan kebijakan mudik tidak secara bersamaan.

4) Khusus untuk angkutan jalan agar ditingkatkan pengaturan kelancaran lalu lintas kendaraan di tempat -tempat rawan kemacetan, rawan kecelakaan, rawan bencana alam di sepanjang jalur lebaran.

5) Untuk kesiapan sarana dalam rangka peningkatan keselamatan dilakukan pemeriksaan kelaikan jalan terhadap armada yang akan diberangkatkan baik di terminal-terminal maupun di pool armada.

6) Peningkatan antisipasi terhadap arus puncak Lebaran yang biasanya terjadi antara **H-4 s/d H-1**, sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang timbul sejalan dengan kebijaksanaan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

b). Kegiatan Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Sepanjang Jalur Lebaran.

Penyelenggaraan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan di sepanjang jalur angkutan lebaran, di simpul – simpul lalu lintas dan angkutan baik di DKI Jakarta maupun kota – kota lainnya perlu mendapat perhatian untuk terwujudnya kondisi lalu lintas dan angkutan sepanjang perjalanan secara lebih tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat. Simpul – simpul lalu lintas dan angkutan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1) Terminal Penyeberangan Merak – Bakauheni.

   (a) Peningkatan pengaturan kelancaran serta ketertiban arus lalu lintas penumpang dan kendaraan, mulai dari masuk terminal, masuk dan keluar Ferry maupun kapal laut (dengan peningkatan fasilitas rambu/informasi lainnya) guna menjamin kelancaran dan keselamatan penyeberangan dan pelayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

   (b) Pengaturan kendaraan umum dan pribadi serta truk yang mengangkut bahan-bahan tertentu yang harus mendapat prioritas penyeberangan.

   (c) Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh aparat terkait secara terpadu di bawah koordinasi Kepala Cabang PT (Persero) ASDP dan atau pejabat yang ditunjuk. Pengaturan jumlah trip untuk kapal ferry maupun kapal cepat disesuaikan dengan kebutuhan dan bila diperlukan bantuan angkutan penyeberangan berupa kapal TNI-AL dan atau kapal bantuan lainnya dengan tarif yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat.

2) Gerbang Tol Cikopo/Cikampek.

   Pengaturan kelancaran, ketertiban dan keselamatan arus lalu lintas kendaraan pada ruas jalan Jomin – Cikopo – Sadang guna mencegah kemungkinan terjadinya konflik lalu lintas di pertigaan Cikopo dan Sadang antara kendaraan yang bergerak dari arah yang berlawanan. ***Untuk monitoring tol Cikopo ini diperlengkapi dengan peralatan CCTV pada pintu gerbang Cikopo.***

   Bila diperlukan dilakukan Pengalihan arus lalu lintas melalui Gerbang tol Kahuripan, Gerbang tol Karawang Timur dan atau Gerbang tol Sadang dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

3) Jalan Tol Purbaleunyi (Purwakarta – Bandung – Cileunyi)

   (a) Gerbang tol Padalarang Barat
   Percepatan proses pembayaran pada gerbang tol Padalarang Barat, khususnya arah Bandung-Jakarta akibat pertukaran system smart card dengan tiket biasa. Diperlukan penambahan

Gerbang tol secara seri untuk pembayaran tol dan penambahan petugas PT. Jasa Marga (Persero) guna membagikan tiket masuk tol sesuai dengan kebutuhan.

(b) Sebagai akibat dari pelimpahan arus lalu lintas Tol Cipularang akan berakibat terjadinya antrian yang cukup panjang di persimpang Surajadi, flyover Pasopati hingga gerbang tol Pasteur.

(c) Ujung Tol Cileunyi.
Hal-hal yang diperlukan dalam menangani permasalahan di persimpangan Cileunyi untuk mengurangi antrian kendaraan antara lain sebagai berikut:

(1) Pengaturan putaran kendaraan yang ditempatkan melalui Jl. Surya Sumantri.
(2) Perlunya petugas lapangan (Dishub) yang bertugas secara intensif dalam mengatur kelancaran lalu lintas.

4) Persimpangan Pejagan (Losari).
Pengaturan dan penertiban arus lalu lintas di simpang Pejagan sebagai titik penyebaran arus lalu lintas menuju Semarang dan menuju Purwokerto melalui Ketanggungan dan ke arah Kuningan melalui Ciledug.

5) Cicalengka-Nagrek-Malangbong.
Pengaturan dan penertiban lalu lintas sepanjang jalur Selatan antara Limbangan-Nagrek yang rawan kemacetan/kecelakaan akibat tanjakan curam, pasar dan persilangan sebidang dengan kereta api.

6) Lintas Wangon – Batas Jawa Barat
Pada jalur selatan karena curah hujan yang tinggi, sangat rawan terhadap bahaya banjir dan longsor seperti pada ruas jalan antara Wangon – Batas Jawa Barat (rawan longsor) terdapat 15 titik rawan longsor.

7) Lintas Penyeberangan.
Terminal penyeberangan, Ujung-Kamal, Ketapang-Gilimanuk, Padang Bai-Lembar dan Kayangan-Pototano mengacu kepada pengaturan di terminal penyeberangan Merak-Bakauheni dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan.

8) Satuan Tugas Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu mengatur kelancaran, ketertiban dan keselamatan arus kendaraan di sepanjang perjalanan sesuai dengan daerah tanggung jawab masing-masing serta harus mewaspadai akan terjadinya arus balik bus penumpang yang perlu mendapat prioritas pengaturannya, agar dapat kembali ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang dan kota-kota asal lainnya secepat mungkin. Hal ini dimaksudkan guna menghindari atau mengurangi gejolak, rasa tidak puas dan bahkan

rasa panik bagi para pemudik yang biasanya sudah lama menunggu angkutan di berbagai terminal pemberangkatan bus yang sudah disediakan.

c). Kegiatan Angkutan Arus Balik

1) Puncak arus balik diperkirakan terjadi empat hari setelah lebaran kedua (H+4), akan tetapi biasanya mulai terjadi pada H + 3 sampai H+7.

2) Mengantisipasi kegiatan masal masyarakat di jalanm khususnya perayaan Syawalan pada daerah tertentu, agar tidak terjadi kemacetan yang parah.

C. Transportasi Kereta Api

1. Pemantauan dilakukan untuk memeriksa kesiapan operasional kereta api antara lain:

   a. Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka);
   b. Kesiapan stasiun-stasiun pemberangkatan;
   c. Pemantauan kesiapan operasional kereta api, meliputi:
      - Kereta api reguler;
      - Kereta api tambahan;
      - Kereta api sapujagat.
   d. Informasi mengenai lokasi-lokasi rawan longsor dan rawan kecelakaan;
   e. Mengidentifikasi dan mengantisipasi daerah-daerah yang sering mendapat gangguan pelemparan.

2. Lokasi kegiatan pemantauan operasional Kereta api, meliputi:
   a. Lintas Jakarta – Bandung – Kroya di DAOP I dan II;
   b. Lintas Jakarta – Cirebon – Semarang di DAOP I, III dan IV;
   c. Lintas Cirebon – Kroya – Solo - Yogyakarta di DAOP III, V dan VI;
   d. Lintas Semarang – Surabaya di DAOP IV dan VII;
   e. Lintas Solo – Madiun – Surabaya di DAOP VI, VII dan VIII;
   f. Lintas Surabaya – Banyuwangi – Kroya di DAOP VIII dan IX;

3. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa angkutan lebaran 2007 (1428 H) ditetapkan skenario operasi sebagai berikut :

   a. Memenuhi rangkaian kereta api reguler sesuai stamformasi Gapeka 2007;
   b. Kekurangan perjalanan KA akan ditambah dengan menjalankan MALKA (maklumat KA) angkutan lebaran;

c. Penambahan rangkaian cadangan bagi pengoperasian kereta api “V slag” (rawan lambat tinggi);

d. Pembatalan KA barang, kecuali untuk kebutuhan pokok dan strategis (BBM).

4. Khusus arus balik dengan angkutan kereta api pada umumnya berlangsung lebih panjang sehingga perlu diwaspadai hal – hal sebagai berikut :

   a. Penyelenggaraan pengaturan arus lalu lintas angkutan penumpang dan kendaraan harus terus ditingkatkan, terutama dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban dan keselamatan masyarakat yang umumnya sudah lelah dengan bekal yang sudah sangat terbatas.

   b. Kebanyakan penumpang arus balik tiba kembali di kota pada malam hari, dan sering menghadapi kesulitan memperoleh pelayanan angkutan kota, lebih-lebih pada saat ini armada angkutan kota yang dapat disediakan untuk angkutan malam hari jumlahnya sangat terbatas.

   c. Menyediakan secara maksimal segala fasilitas yang dapat membantu pelayanan bagi para penumpang yang sengaja bermalam di terminal bus menunggu siang hari karena alasan keamanan.

5. Terdapat daerah rawan banjir dan longsor :

   a. DAOP III (Cirebon)
      - Pabuaran – Pegaden Km 107 - 129
      - Terisi – Jatibarang Km 157 - 177
      - Sindang Laut – Ciledug Km 241 - 248
      - Ketanggungan – Songgom Km 272 - 288
      - Tanjung – Brebes Km 152 – 161
      - Antara Stasiun Ciganea – Sukatani
      - Antara Stasiun Cicalengka – Lebakjero
      - Antara Stasiun Kedungbanteng – Walikukun
      - Antara Stasiun Jerakah - Kaliwungu

   b. DAOP IV (Semarang)
      - Batang – Kuripan Km 63 – 76
      - Kaliwungu – Mangkang Km 13 – 17
      - Sedadi Km 47 – 53
      - Sulur – Randublatung Km 46 – 64
      - Gubog Km 32 – 33
      - Jambon Km 18 – 19

   c. DAOP V (Purwokerto)
      - Banjar Km 357 – 319
      - Kawungwetan – K. Kangkung Km 365 – 370
      - Soka – Kebumen Km 448 – 450
      - Prupuk – Limbangan Km 248 – 312

- Notog – Kebasan Km 360 – 361
- Banjar Km 317 – 318
- Tambak Km 423 – 424

d. DAOP IX (Jember)
   - Probolinggo – Pasuruan Km 64 – 99
   - Jember – Kalisat Km 107 – 205
   - Kalibaru Km 24 – 30
   - Bondowoso – Situbondo Km 264 – 271

6. Daerah rawan pelemparan :

   a. DAOP I (Jakarta dan Jabotabek)
      - Empl. Jatinegara, Bekasi, Karawang, Cikampek
      - Jatinegara – Bekasi
      - Karawang – Cikampek
      - Jatinegara – Pasar Senen
      - Pasar Senen – Jakarta Kota

   b. DAOP II Bandung
      - Empl. Purwakarta, Plered, Padalarang, Kiaracondong
      - Cikampek - Purwakarta
      - Ciganea – Plered
      - Cilame – Padalarang
      - Kiaracondong – Cicalengka
      - Padalarang – Bandung

   c. DAOP III Cirebon
      - Empl. Haurgeulis, Jatibarang, Cirebon, Prujakan, Ciledug
      - Cikampek – Haurgeulis
      - Jatibarang – Cirebon
      - Cirebon Prujakan - Losari
      - Ciledug – Ketanggungan

   d. DAOP IV Semarang
      - Empl. Tegal, Semarang, Poncol, Weleri
      - Pekalongan – Batang
      - Weleri – Semarang Poncol
      - Cepu – Bojonegoro

   e. DAOP V Purwokerto
      - Empl. Prupuk, Kroya
      - Prupuk – Bumiayu
      - Gombong – Kebumen

   f. DAOP VI Yogyakarta
      - Empl. Wates, Lempuyangan, Purwosari
      - Wates – Yogyakarta
      - Surakarta – Sragen

g. DAOP VII Madiun
   - Empl. Kertosono, Jombang
   - PAron – Madiun
   - Jombang – Mojokerto

h. DAOP VIII Surabaya
   - Empl. Mojokerto, Sepanjang, Wonokromo, Sidoarjo
   - Wonokromo – Mojokerto
   - Wonokromo – Sidoarjo
   - Babat – Bojonegoro
   - Bangil – Pasuruan

i. DAOP IX Jember
   - Empl. Probolinggo, Jember
   - Sidoarjo – Probolinggo
   - Jember – Kalibaru

D. Transportasi Laut.

1. Angkutan Lebaran melalui transportasi laut meliputi angkutan penumpang kapal laut, angkutan bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, cabe merah, bawang merah, kacang tanah, daging sapi, daging ayam, dan telur serta angkutan ternak potong untuk memenuhi kebutuhan di wilayah JABOTABEK dan kebutuhan di wilayah lainnya sesuai dengan program instansi terkait seperti BULOG, Departemen Perdagangan dan Dep. Pertanian.

2. Pengaturan dan perencanaan operasional meliputi sistim pelayanan, keselamatan pelayaran dan pengangkutan bahan pokok dan ternak potong.

3. Untuk pengendalian dan pemantauan perlu memperhatikan lonjakan penumpang dan atau situasi persediaan dan harga bahan pokok dengan cara bekerjasama (koordinasi) dengan instansi terkait.

4. Guna menjamin kelancaran pelaksanaan Angkutan Lebaran melalui transportasi laut di seluruh Indonesia, ditetapkan rencana operasi moda laut.

E. Transportasi Udara.

1. Dengan arus penumpang melalui udara yang diperkirakan mengalami kenaikan ***14,88 %*** untuk penerbangan dalam negeri dan **20,13%** untuk penerbangan luar negeri, perlu dipersiapkan tindakan untuk memaksimalkan utilitas pesawat udara berjadwal maupun tidak berjadwal (borongan) dan penambahan jam operasi Bandara.

2. Peningkatan pelayanan sistem reservasi dan memperkecil atau meniadakan *"over booking"* untuk menjamin kelancaran dan kepastian keberangkatan penumpang serta untuk menghindari tiket habis akan tetapi tempat duduk kosong atau penumpang dengan status "OK" tidak terangkut.
3. Penyediaan informasi yang lengkap, jelas dan tersebar antara lain tentang rute penerbangan, kapasitas yang tersedia, jadwal penerbangan, counter transit dan ruang transit di 23 bandara.
4. Pengaturan kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan penerbangan pada semua Bandara, terutama pada Bandara – Bandara yang cukup padat antara lain Soekarno Hatta - Jakarta, Polonia - Medan, Juanda - Surabaya, Ngurah Rai - Denpasar, Hasanuddin - Makasar.
5. Menambah "*counter check in*" di bandar udara untuk menjamin kelancaran dan ketertiban keberangkatan penumpang pada Bandara yang cukup padat seperti tersebut di atas.
6. Penambahan frekuensi penerbangan pada rute padat, dalam dan luar negeri.
7. Kerjasama dengan perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal, sepanjang memenuhi persyaratan kelaikan dan keselamatan penerbangan.
8. Penambahan jam operasi bandar udara sesuai dengan kebutuhan dan fasilitasnya serta memenuhi syarat keselamatan penerbangan.
9. Penerapan sistem reservasi terpadu yang efektif dan efisien.
10. Sistem transfer yang mudah dan cepat dengan cara memperbanyak counter transfer dan transit dengan rambu-rambu jelas serta Sistem Informasi Manajemen yang memungkinkan komunikasi antar stasiun dan Bandara.
11. Menetapkan tarif Angkutan Udara sebagai berikut :
    a. Penerapan tarif harga jual perusahaan angkutan udara niaga berjadwal harus tetap dapat menjamin keselamatan penerbangan dan dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan.
    b. Kepada penyelenggara Bandara diminta ikut memonitor pemberlakukan tarif harga jual penumpang kelas ekonomi angkutan udara dalam negeri berdasarkan KM. 9 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dan KM 11 Tahun 2007 tentang Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas ekonomi.
    c. Pada "*low season*" dihimbau jangan memberlakukan tarif yang dapat merugikan sendiri (tarif harga jual di bawah biaya) dan pada "*high/peak season*" (masa lebaran) tidak boleh melebihi tarif batas atas, sebagaimana KM. 9 Tahun 2002 dan KM 11 Tahun 2007 serta menghimbau kepada para penyelenggara bandara untuk menindak tegas para calo bandara.

12. Penyelenggara diminta untuk menyiapkan bandara guna mensukseskan angkutan lebaran dengan tetap meningkatkan kewaspadaan terkait aspek keamanan dan keselamatan penerbangan.

13. Apabila terjadi kekurangan kapasitas angkut pada salah satu perusahaan, untuk mencegah terjadinya kericuhan di bandara maka para penyelenggara bandara supaya mengkoordinir para perusahaan yang beroperasi di bandara tersebut.

14. Berkoodinasi dengan Angkutan udara tidak berjadwal untuk menyiapkan pesawatnya dalam hal :
    a. Kapasitas Angkutan lebaran tidak mencukupi.
    b. Terjadi peningkatan penumpang yang mendadak tinggi.
    c. Menggunakan tarif yang berlaku KM. 9 Tahun 2002 dan KM 11 Tahun 2007.
    d. Menyesuaikan status angkutan sesuai angkutan udara berjadwal.
    e. Mengikuti peraturan yang berlaku untuk angkutan udara berjadwal baik penumpang, barang dan pos.

F. Lokasi Posko, Jaringan Komunikasi Posko/ Sistem Informasi

1. Lokasi Posko

Untuk mengantisipasi kondisi dan situasi saat pelaksanaan angkutan lebaran seperti :

a. Pelayanan penumpang di terminal dan stasiun terutama pada saat jumlah penumpang mencapai puncak;

b. Pengalihan arus lalu lintas angkutan barang dan kendaraan tidak umum pada saat mendekati hari puncak;

c. Perubahan arus lalu lintas secara insidentil untuk daerah rawan macet, rawan kecelakaan dan bencana alam.

Maka diperlukan pembentukan Posko-Posko di tiap-tiap terminal maupun stasiun utama seperti Terminal : Kampung Rambutan, Pulo Gadung, Lebak Bulus, Merak, Kalideres, Damri Kemayoran, Tirtonadi, Tegal, Harjamukti, Cicaheum, Purwokerto; Stasiun: Gambir, Senen, Tawang, Poncol, Solo Balapan, Tegal, Kutoarjo.

Disamping itu untuk pengaturan dan pengendalian lapangan pada lokasi-lokasi kritis, rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dibentuk adanya Pos Koordinasi Lapangan (Poskorlap) yang dilaksanakan selama masa penyelenggaraan angkutan lebaran.

Kegiatan Poskorlap yang secara koordinatif melibatkan personil dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Polri dilaksanakan dengan menggunakan pola statis dan mobile dengan lokasi sebagai berikut:

- Ujung Tol Gerem
- Ujung Tol Cikampek
- Nagrek
- Kadipaten
- Patrol
- Sadang

Untuk kereta api, Posko pusat digabungkan dengan Posko Nasional, sedangkan di daerah diadakan posko penanganan rintang jalan di 7 (lokasi) lokasi yaitu Jakarta, Cirebon, Bandung, Surabaya, Purwokerto, Yogyakarta, Semarang dan dilakukan koordinasi dengan posko yang dilakukan oleh PT. KA (Persero) pada setiap DAOP dan Divre.

2. Jaringan Komunikasi Posko/Sistem Informasi.

Untuk membantu memudahkan koordinasi dan komunikasi antara posko yang satu dengan yang lain diperlengkapi dengan alat kominikasi pada tiap-tiap posko baik menggunakan radio trunking, handy-talky, handphone, telepon/ faximile (Nomor 021 3506129; 3506138). Untuk hubungan komunikasi dengan **Pos Koordinasi Harian Angkutan Lebaran Terpadu** yang berada di ***Ruang Nanggala Lantai 7 Gedung Cipta Departemen Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta***.

Disamping peralatan komunikasi tersebut dalam sistem informasi akan digunakan juga website *http://www.hubdat.web.id* dan melalui SMS dengan nomor **9123 untuk informasi lalu lintas dan angkutan, Customer Care 9828** dan **0813 8006 8000.**

Pada lebaran tahun 2007 (1428 H) ini dalam monitoring kondisi lalu lintas dan angkutan akan dilakukan dengan menggunakan fasilitas CCTV yang ditempatkan pada 11 (sebelas) lokasi dengan titik-titik : Padalarang, Kadipaten, Patrol, Nagrek, Cileunyi, Losari, terminal Purwokerto, perlintasan KA Sumpiuh dan Karanganyar, Stasiun Gambir, Pelabuhan Penyeberangan Merak/Bakauheni, Bandara Soetta, Bandara Juanda, Pelabuhan Tj. Priok, Pelabuhan Tj. Perak dan Pelabuhan Makassar yang terhubung secara on-line dengan Pos Koordinasi Harian Angkutan Lebaran Terpadu. Pos Koordinasi tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal **6 Oktober 2007 pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan tanggal 22 Oktober 2007 pukul 08.00 waktu setempat.**

Dalam rangka pemberian informasi kepada pengguna jalan akan dipasang Variable Message Sign (VMS) di jalur Pantura (Pintu Tol Cikopo, Jembatan Timbang Balonggandu, Jembatan Timbang Losarang, dan Jembatan Timbang Tanjung).

Untuk pemantauan kinerja jaringan jalan di Pantura, Jalan Tol Cikampek dan Jalan Tol Cipularang akan digunakan Global Positioning System (GPS) dari dua perusahaan angkutan jalan.

X. PENGORGANISASIAN

A. KOORDINASI

1. KOORDINASI DENGAN DEPARTEMEN PEMERINTAHAN

Untuk memperoleh efektifitas yang tinggi dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2007 (1428 H), perlu dilakukan koordinasi dengan berbagai instansi, sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum

1) Melakukan kunjungan bersama ke lapangan untuk memperoleh data tentang keadaan dan prasarana jalan dan jembatan, sebagai acuan untuk melakukan perbaikan, peningkatan atau pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan angkutan lebaran;

2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan di jalan tol dan meningkatkan segala fasilitas untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas di semua jalan tol;

3) Mempersiapkan sarana dan fasilitas untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, bencana alam atau kejadian lain yang mengganggu kelancaran angkutan lebaran;

b. Koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri.

Koordinasi dilakukan agar Menteri Dalam Negeri dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota agar penyelenggaraan angkutan lebaran dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib.

c. Koordinasi dengan Departemen Perdagangan.

Koordinasi dilakukan dalam pengaturan kelancaran distribusi bahan pokok selama masa Angkutan Lebaran 2007 (1428 H).

d. Koordinasi dengan Departemen Kesehatan.

Untuk meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada pada lokasi-lokasi tertentu pada jalur Angkutan Lebaran 2007 (1428 H) kepada masyarakat pemudik yang memerlukan bantuan kesehatan dan peningkatan efektifitas penanganan korban kecelakaan.

e. Koordinasi dengan Departemen Komunikasi dan Informatika

Melakukan penyebaran informasi Angkutan Lebaran 2007 (1428 H) kepada seluruh masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Angkutan Lebaran 2007 (1428 H).

f. Koordinasi dengan Departemen Agama

Untuk menghilangkan pos-pos pundi amal yang dibangun oleh masyarakat sepanjang jalur utama dan jalur alternatif lebaran.

g. Koordinasi TNI

1) Melakukan koordinasi untuk memperoleh bantuan alat transportasi baik angkutan laut, angkutan darat maupun angkutan udara milik TNI sesuai kemampuan yang tersedia, apabila sewaktu-waktu diperlukan.

2) Melakukan koordinasi untuk memperoleh bantuan pengamanan, khususnya bagi daerah atau lintasan yang dipandang perlu.

h. Koordinasi dengan Kepolisian RI.

1) Menyiapkan dan melaksanakan langkah/tindakan penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan, sejalan dengan Rencana Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2007 (1428 H) dan Rencana Operasi Ketupat Lebaran 2007 (1428 H).

2) Melakukan monitoring, pendataan dan pelaporan kecelakaan lalu lintas secara periodik selama masa angkutan lebaran.

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan investigasi kecelakaan lalu lintas.

i. Koordinasi dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pengaturan/penyediaan BBM.

j. Koordinasi dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pengaturan mudik bersama.

k. Koordinasi dengan Departemen Pertanian, dalam rangka kelancaran distribusi penyediaan bahan pangan.

l. Koordinasi dengan PT. (Pesero) Jasa Raharja dalam rangka pelayanan asuransi apabila terjadi kecelakaan.

m. **Koordinasi dengan Para Gubernur** selaku **Koordinator Pelaksana Tingkat Provinsi** Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2007 (1428 H) di masing-masing Provinsi, agar melakukan langkah-langkah untuk menciptakan angkutan lebaran yang aman, tertib dan lancar di wilayahnya dengan kegiatan :

1) Menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing dengan mengacu kepada Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2007 (1428 H) Tingkat Nasional.

2) Mengkoordinasikan Bupati/Walikota di wilayahnya untuk menyusun rencana dan program kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas serta mempersiapkan kebutuhan angkutan yang diperlukan dalam penyelenggaraan angkutan di wilayah masing-masing, baik darat, laut maupun udara.

3) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2007 (1428 H).

4) Mempersiapkan fasilitas umum dan memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

5) Membentuk Tim Pos Koordinasi Terpadu di Tingkat Provinsi sebagai sarana komunikasi dengan Pos Koordinasi Tingkat Nasional dan Pos Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota.

6) Menyampaikan laporan harian penyelenggaraan angkutan lebaran kepada Menteri Perhubungan melalui Pos Koordinasi Tingkat Nasional.

7) Melakukan optimalisasi dan perbaikan prasarana transportasi di wilayahnya sesuai kewenangannya.

8) Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

n. **Koordinasi dengan Para Bupati/Walikota** selaku **Koordinator Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota** Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2007 (1428 H) di masing-masing Kabupaten/Kota, agar melakukan langkah-langkah untuk menciptakan angkutan lebaran yang aman, tertib dan lancar diwilayahnya dengan kegiatan :

1) Menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran sesuai situasi dan kondisi daerah masing–masing dengan mengacu

kepada Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2007 (1428 H) Tingkat Nasional dan Provinsi.

2) Menyusun rencana dan program kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas serta mempersiapkan kebutuhan angkutan yang diperlukan dalam penyelenggaraan angkutan di wilayah masing-masing, baik darat, laut maupun udara.

3) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan angkutan lebaran.

4) Melakukan optimalisasi dan perbaikan prasarana transportasi di wilayahnya sesuai kewenangannya.

5) Mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk mengurangi terjadinya kemacetan dan kecelakaan serta mengantisipasi daerah rawan bencana alam (banjir, tanah longsor, kabut) di wilayahnya.

6) Mengawasi pelaksanaan tarif angkutan, kelaikan kendaraan dan tanggap darurat serta mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan berlaku apabila dijumpai pelanggaran.

7) Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional melalui Koordinator Pelaksana Tingkat Provinsi.

2. KOORDINASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

1) Menjabarkan Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2007 (1428 H) dalam Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2007 (1428 H).

2) Bersama instansi terkait mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan angkutan pada masa Angkutan Lebaran.

3) Menyiapkan petugas dan peralatan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Lebaran secara terencana khususnya kemampuan analisis dan cara bertindak yang tepat.

4) Merencanakan dan melaksanakan latihan/gladi kemampuan penyelenggaraan sebelum pelaksanaan Angkutan Lebaran.

5) Mengatur personil dan peralatan komunikasi baik yang bersifat stasioner, mobile maupun khusus untuk kepentingan komunikasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran.

6) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

7) Menyiapkan Posko Angkutan Lebaran Terpadu.

b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1) Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan angkutan kereta api pada masa Angkutan Lebaran 2007 (1428 H).

2) Memanfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana angkutan kereta api yang dapat dioperasikan untuk mendukung Angkutan Lebaran.

3) Mengadakan koordinasi dengan intansi terkait dan Mabes Polri.

4) Menyiapkan Posko Angkutan Lebaran.

c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

1) Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan angkutan laut pada masa Angkutan Lebaran 2007 (1428 H).

2) Memanfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana angkutan laut yang dapat dioperasikan untuk mendukung Angkutan Lebaran.

3) Mengadakan koordinasi dengan intansi terkait dan Mabes TNI-AL.

4) Menyiapkan Posko Angkutan Lebaran.

d. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

1) Mengkoordinasikan seluruh unit kerja angkutan udara dan instansi terkait dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2007 (1428 H).

2) Menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana yang dapat dioperasikan untuk mendukung Angkutan Lebaran.

3) Mengkoordinasikan dengan penyelenggara bandar udara agar meningkatkan kesiapan fasilitas di bandar udara, menyiapkan posko di Bandar udara, menyiapkan kotak saran di *check in area*, memberantas calo di bandara, sistem keamanan (*security*) di bandara, penyampaian laporan dan informasi penting mengenai penyelenggaraan angkutan ke Posko Tingkat Nasional.

4) Melakukan koordinasi dengan perusahaan angkutan udara tidak berjadwal untuk menyiapkan pesawatnya dalam hal terjadi kapasitas angkutan lebaran tidak mencukupi atau terjadi peningkatan penumpang yang mendadak tinggi.

5) Melakukan koordinasi dengan TNI Angkutan Udara dalam hal permohonan pesawat TNI-AU dapat dipakai untuk mengangkut penumpang di bandar udara sipil apabila terjadi permintaan penumpang yang cukup tinggi dan sangat mendesak.

6) Menyiapkan Posko Angkutan Lebaran.

e. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan analisis dan evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2007 (1428 H).

f. Badan SAR Nasional.

1) Mengkoordinasikan kesiapan, kesiagaan dan pengendalian unsur-unsur SAR di seluruh wilayah tanggung jawab SARNAS, dalam rangka mengantisipasi terjadinya musibah pelayaran, penerbangan dan bencana lainnya.

2) Mempersiapkan serta mengendalikan unsur SAR di Pusat dan Daerah, dalam penanggulangan musibah maupun untuk kepentingan pemantauan arus lalu lintas.

3) Mempersiapkan sarana helikopter untuk pemantauan via udara oleh pejabat tinggi negara.

4) Melakukan koordinasi dengan Organisasi Radio Amatir Indonesia (Orari) dan wirabhakti Indonesia SAR Information Club dalam hal penyelenggaraan komunikasi dalam rangka mendukung Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2007 (1428 H).

g. Badan Meteorologi dan Geofisika.

Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memberikan informasi sesuai dengan bidang tugasnya kepada seluruh instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2007 (1428 H), khususnya pada musim Hujan dan musim Barat.

3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI lainnya seperti :

Koordinasi dengan Asosiasi/Organisasi Masyarakat seperti ORGANDA, PT. KAI, INACA, INSA, GAPASDAP, GAIKINDO, IMI, MTI, MASKA, TVRI, RRI, RCTI, SCTV, ANTV, TPI, INDOSIAR, METROTV, TVGLOBAL, TRANSTV, RADIO SONORA, RADIO SALVATORE, ORARI, RAPI, PRSSNI, YLKI, ORGANISASI PEMUDA DAN PRAMUKA untuk membantu pelaksanaan kelancaran dan pengamanan dalam rangka mendukung keberhasilan Angkutan Lebaran.

B. LOGISTIK DAN ANGGARAN, PENGENDALIAN SERTA INSTRUKSI

1. Logistik dan Anggaran

a. Dukungan logistik untuk penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2007 (1428 H) menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.

b. Kebutuhan biaya untuk pelaksanaan Angkutan Lebaran disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada unit kerja masing-masing.

2. Pengendalian Penyelenggaraan.

a. Di Tingkat Pusat oleh Menteri Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dirjen Perhubungan Darat.

b. Di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi setempat.

c. Di tingkat Kabupaten atau Kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kota/Kabupaten setempat.

d. Laporan kepada Menteri Perhubungan dilaksanakan setiap hari dan/atau setiap saat dibutuhkan.

3. Lain-lain:

a. Koordinasi perencanaan antar Departemen, antar sektor dan antar instansi baik di Tingkat Nasional maupun daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dengan unsur Perhubungan sebagai pihak yang mengambil inisiatif.

b. Bermacam hambatan dan kerawanan yang terjadi di lapangan agar diatasi secara terkoordinasi disesuaikan dengan kondisi dan situasi spesifik daerah oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan wilayah tanggung jawab masing - masing.

c. Tingkatkan dan mantapkan koordinasi serta kerjasama lintas sektoral antar instansi terkait dengan melibatkan masyarakat di wilayah masing - masing.

d. Cegah dan hindari kegiatan dan atau tindakan over acting dan perbuatan negatif lain yang dapat menghambat kelancaran penyelenggaraan angkutan lebaran.

e. Kesiapan personil dilakukan oleh masing-masing instansi yang bersangkutan. Perkuatan baik personil maupun sarana dikoordinasikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan baik oleh pusat maupun daerah.

f. Gelar apel kesiapsiagaan petugas dilaksanakan secara serentak sesuai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

g. Hari H (Idul Fitri 1428 H) akan disesuaikan berdasarkan penetapan Pemerintah oleh Menteri Agama.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

ttd

HERU PRASETYO, SH.
NIP. 120 138 360